



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,

Telepon (0752) 93947 Faxsimile. 90810

Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER BUDGET STATEMENT	
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)	
Nama SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran	2027
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Capaian Program	Nilai Evaluasi AKIP SKPD
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub-Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kode Rekening Sub-Kegiatan	1.03.01.2.01.0001
Analisis Situasi	Dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara terpadu dan terkoordinasi, PUG menjadi bagian integral dalam proses pembangunan daerah serta tidak terpisahkan dari seluruh tahapan pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta diperkuat dengan regulasi turunannya, proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan perspektif gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan meliputi masyarakat (RT/RW/Fasilitator Kelurahan), perwakilan perempuan, tokoh masyarakat, serta organisasi pemuda. Proses perencanaan dilaksanakan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang diawali dari tingkat kelurahan (mufakat RW) hingga Musrenbang kecamatan. Proses ini bertujuan untuk menjaring kebutuhan pembangunan dari tingkat akar rumput, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta responsif gender. Berdasarkan kondisi akhir Tahun 2025, capaian kinerja indikator "Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun" telah mencapai 100%, dengan realisasi sebanyak 16 dokumen perencanaan. Aspek Akses, Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dapat diakses baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) ataupun Rencana Kerja (Renja), disamping itu Setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, dan pemuda. Aspek Kontrol/ Kewenangan, Pengendalian penerapan dalam mengakomodir pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui evaluasi berkala setiap triwulan, dalam bentuk pelaporan akan kegiatan yang didalamnya disisipkan amanat pemberian kesempatan yang sama dalam pengarusutamaan gender. Aspek Partisipasi, Partisipasi aktif dilaksanakan melalui sub-kegiatan rekonstruksi jalan, dan juga pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk mengakomodir kebutuhan akan pengarusutamaan gender. Berdasarkan pelaksanaan verifikasi usulan musrenbang dan pikir yang dilaksanakan, terlihat bahwa hampir dapat dikatakan berimbang antara perempuan dan laki-laki: lurah dan fasilitator kelurahan, yang berasal dari LPM atau Petugas Yandu. Aspek Manfaat, Dengan mengakomodir pengarusutamaan gender pada dokumen perencanaan dinas, maka perencanaan pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang Kota Payakumbuh berupaya dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Penyebab Internal: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan, dimana target pelayanan dianggap homogen tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Penyebab Eksternal: Budaya kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat

Rencana tindak	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tujuan	Adanya Dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek terkait tugas pokok dan fungsi kewenangan dinas pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan juga urusan pertanahan.			
			Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran program kerja dinas yang responsif gender.			
			Adanya dokumen pelayanan public, yang menerangkan, menjelaskan dan berisikan standar operasional kerja dan standar pelayanan publik.			
			Adanya dokumen penilaian kinerja dinas dari indikator ketercapaian dan dari respon pengguna jasa.			
			Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender.			
		Aktivitas	Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah, untuk menetapkan Tim Kerja dan Uraian Tugas dari anggota Tim.			
			Melakukan Rapat Persiapan, Rapat Verifikasi, dan Rapat Evaluasi dalam merencanakan, mempersiapkan, memverifikasi usulan, mengevaluasi rencana kerja dan memvalidasi data dan informasi pada dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik yang disusun.			
			Menyiapkan resume kerja dan draft awal rancangan dokumen kepada bidang sebagai bahan referensi dari bidang/ tim kerja, koreksi dan persetujuan bidang.			
			Mencetak, mengumpulkan dan mendistribusikan dokumen kerja			
		Sumber Daya	Dana	74.452.192,00		
			SDM	5 orang		
			Sarana Prasarana	1. Peralatan Kerja (Komputer,printer, dsb) 2. Ruang Kerja		
		Indikator Opuput	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran yang disusun			
		Outcomes	Meningkatnya transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat.			

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PU/PR Kota Payakumbuh



Keterangan:

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1

2

3

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH:

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,
Telepon (0752) 93947 Faxsimile. 90810

Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER BUDGET STATEMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)	
Nama SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran	2027
Program	Penyelenggaraan Jalan
Capaian Program	Persentase Jalan Status Kota dengan Kondisi Mantap
Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
Sub-Kegiatan	Rekonstruksi Jalan
Kode Rekening Sub-Kegiatan	1.03.10.2.01.0033
Analisis Situasi	Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), memiliki peran penting dalam mewujudkan infrastruktur yang aman, nyaman, dan bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif pengarusutamaan gender, ketersediaan penerangan jalan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan rasa aman, terutama bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan saat beraktivitas di ruang publik, khususnya pada malam hari. Keterbatasan akses terhadap penerangan jalan yang memadai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas, serta membatasi mobilitas dan partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Berdasarkan capaian pelaksanaan anggaran Tahun 2025, persentase jalan yang telah dilayani PJU mencapai 52,53%, dengan panjang PJU yang dipelihara sepanjang 660 meter. Selain itu, pengadaan lampu jalan telah dilaksanakan pada 160 titik yang tersebar di ruas-ruas jalan Kota Payakumbuh. Pada subkegiatan ini juga dilakukan rekonstruksi jalan sepanjang 1,31 km serta pemeliharaan trotoar sepanjang 115 meter. Capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang tidak hanya berorientasi pada konektivitas, tetapi juga pada aspek keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas yang responsif gender. Ke depan, peningkatan cakupan PJU serta penyediaan fasilitas pejalan kaki yang memadai perlu terus dioptimalkan guna mendukung terwujudnya ruang publik yang aman, nyaman dan setara bagi seluruh masyarakat. Aspek Akses, Penerangan Jalan Umum yang ada di Kota Payakumbuh tersebar di jalan utama serta jalan sekunder agar mampu menerangi ruas jalan saat malam hari. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya tindak kejahatan yang notabene sering dialami oleh perempuan. Aspek Kontrol/ Kewenangan, Perempuan memiliki kerentanan dalam hal kejahatan yang mayoritas dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan penerangan di tempat-tempat yang berpotensi untuk terjadinya kejahatan. Penerangan jalan umum juga sangat diperlukan di daerah-daerah strategis dengan arus lalu lintas yang sibuk. Aspek Partisipasi, Setiap elemen masyarakat bertanggung jawab atas keutuhan keberadaan PJU sebagai infrastruktur umum yang sangat penting keberadaannya. Aspek Manfaat, Keberadaan penerangan jalan umum memberikan dampak yang sangat penting dalam arus lalu lintas warga Kota Payakumbuh khususnya di malam hari. Namun masih ada ruas-ruas jalan di wilayah kota masih belum memiliki penerangan sehingga masih ada potensi kejahatan dan kenakalan remaja di kawasan tersebut. Penyebab Internal: Masih banyaknya ruas jalan yang belum diterangi PJU mengakibatkan tindakan kriminal, khususnya terhadap perempuan masih marak terjadi. Penyebab Eksternal: 1. Kurang koordinasi antar lembaga membuat pelaksanaan pengadaan lampu jalan kurang diakomodir; 2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemeliharaan infrastruktur umum, khususnya lampu jalan

Rencana tindak	Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan	Tujuan	Meningkatkan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat di malam hari dan keindahan kota dan permukiman.		
		Aktivitas	Penambahan titik-titik lampu jalan hingga ke bagian yang rawan kejahatan dan kenakalan remaja		
			Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap lampu-lampu jalan yang telah ada		
			Memberikan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat terkait upaya memelihara infrastruktur umum khususnya lampu jalan.		
		Sumber Daya	Dana	10.700.000.000,00	
			SDM	11 orang	
			Sarana Prasarana	1. Peralatan Kerja	
				2. Ruang Kerja	
		Indikator Ouput	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekontruksi Jalan		
			Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Dipelihara		
			Panjang Trotoar yang Dipelihara		
Outcomes		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan			

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh



Keterangan:

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1

2

3

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH:

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,
Telepon (0752) 93947 Faksimile. 90810

Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER BUDGET STATEMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)	
Nama SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran	2027
Program	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Capaian Program	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi Berkinerja Baik
Kegiatan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Sub-Kegiatan	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
Kode Rekening Sub-Kegiatan	1.03.11.2.01.11
Analisis Situasi	Subkegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola sektor konstruksi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Salah satu fokus pelaksanaan kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bagi badan usaha jasa konstruksi. Penerapan SMAP menjadi penting dalam meminimalisir praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa konstruksi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian, mengingat masih terdapat kesenjangan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Hal ini tercermin dari rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi yang belum sepenuhnya optimal, serta perlunya peningkatan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengembangan kapasitas di sektor jasa konstruksi. Dalam konteks pengarusutamaan gender, kegiatan pembinaan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi yang lebih inklusif serta memberikan kesempatan yang setara dalam peningkatan kompetensi dan penguatan kelembagaan. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap lembaga jasa konstruksi tercatat sebanyak 109 lembaga, dengan rasio tenaga operator/teknisi/analisis bersertifikat kompetensi mencapai 73%. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kelembagaan, serta mendorong kinerja sektor jasa konstruksi. Aspek Akses, Kurangnya Data Terpilah Gender sehingga menghambat identifikasi kebutuhan spesifik perempuan. Hal ini menyebabkan program yang disusun kurang mengakomodir perempuan, sehingga akses mereka terhadap pelatihan dan sertifikasi menjadi terbatas. Aspek Kontrol/ Kewenangan: Memonitor sejauh mana perempuan dilibatkan dalam proses pelatihan, sertifikasi, manajemen proyek, dan kepemimpinan kelembagaan. Aspek Partisipasi, Perempuan didorong untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pada sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi. Perempuan diikuti sertakan dalam proses diskusi, pertemuan dan menyampaikan kendala dalam sektor konstruksi. Aspek Manfaat, Terwujudnya lembaga jasa konstruksi yang inklusif dan responsif gender., Adanya kebijakan internal kelembagaan yang mendukung kesetaraan gender. Penyebab Internal: 1. Kelembagaan tidak memiliki data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam pelatihan, rekrutmen, dan peningkatan kapasitas; 2. Akibatnya, tidak ada landasan kuat untuk menyusun kebijakan atau mengevaluasi kesetaraan gender secara objektif; 3. Minimnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan karena belum adanya kebijakan internal yang mendukung kesetaraan gender. Penyebab Eksternal: 1. Adanya pandangan/ stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan pada sektor konstruksi; 2. Tidak adanya kuota atau insentif yang mendorong keterlibatan perempuan dalam program peningkatan kapasitas; 3. Lemahnya sinergi antara lembaga pembinaan konstruksi dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan masyarakat sipil yang fokus pada isu gender.

Rencana tindak Lanjut	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tujuan	Mewujudkan Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Inklusif Gender dan Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Konstruksi		
		Aktivitas	Penguatan Regulasi dan Kebijakan Internal		
			Menyediakan pelatihan dengan waktu dan lokasi yang aksesibel bagi perempuan		
			Kampanye dan Advokasi Kesetaraan Gender di Sektor Konstruksi serta Kemitraan Strategis dan Kolaborasi Antar Lembaga		
		Sumber Daya	Dana	150.000.000,00	
			SDM	12 orang	
			Sarana	1. Peralatan Kerja	
			Prasarana	2. Ruang Kerja	
		Indikator Ouput	1. Tersusunnya kebijakan internal pembinaan jasa konstruksi yang responsif gender; 2. Terselenggaranya pelatihan teknis dan manajerial untuk peningkatan SDM; 3. Tersedianya data terpilah gender tenaga kerja konstruksi daerah; 4. Terjalannya kerja sama lintas sektor untuk peningkatan kapasitas kelembagaan		
		Outcomes	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan jasa konstruksi yang responsif gender; 2. Terwujudnya partisipasi aktif perempuan dalam sektor jasa konstruksi; 3. Meningkatnya kesadaran dan komitmen pimpinan terhadap isu gender di sektor konstruksi; 4. Terwujudnya kemitraan lintas sektor dalam pengarusutamaan gender konstruksi		

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh



Keterangan:

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1
2
3

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH:

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,

Telepon (0752) 93947 Faksimile. 90810

Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER BUDGET STATEMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)	
Nama SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran	2027
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian Program	Indeks AKIP SKPD
Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub-Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kode Rekening Sub-Kegiatan	1.03.01.2.09.10
Analisis Situasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional serta kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif pengarusutamaan gender, ketersediaan sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga harus mampu menjamin kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kondisi bangunan dan fasilitas yang tidak optimal berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, membatasi akses, serta menurunkan kualitas pelayanan bagi kelompok rentan. Pelaksanaan subkegiatan ini mencakup pemeliharaan dan rehabilitasi berbagai sarana pendukung, seperti genset, alat pendingin (AC), komputer, serta peralatan rumah tangga lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kondisi bangunan tetap optimal, peralatan berfungsi dengan baik, memperpanjang umur pakai, serta mendukung kelancaran operasional kantor. Aspek Akses, Akses Terbatas Perempuan terhadap Informasi dan Proses Pengadaan sehingga akses mereka terhadap informasi mengenai pemeliharaan alat atau fasilitas kantor menjadi terbatas dan Keterbatasan Keterwakilan dalam Tim Perencana dan Evaluator Tim yang menyusun RKA/RKPD atau tim pemeliharaan barang dan fasilitas jarang mencakup keterwakilan gender secara seimbang, sehingga perspektif perempuan tidak terakomodasi. Aspek Kontrol/ Kewenangan: Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang Gender di Kalangan Pengambil Kebijakan, Banyak aparat pemerintah yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep gender dan Budaya Patriarki dan Stereotipe Gender termasuk Norma sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berhak atas kontrol anggaran dapat menghambat perempuan dalam mengakses kewenangan terkait pengelolaan belanja Aspek Partisipasi, Perempuan lebih sering ditempatkan di posisi administratif atau pendukung, yang kurang terlibat langsung dalam perencanaan serta Dominasi laki-laki dalam posisi strategis dan teknis (seperti teknisi, pengadaan, logistik) membuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait belanja dan pemeliharaan alat kantor/rumah tangga menjadi rendah Aspek Manfaat, Keterlibatan Perempuan dalam Evaluasi Manfaat jarang dapat dilibatkan dalam proses umpan balik atau penilaian kebutuhan, mereka juga pengguna aktif, terutama untuk area seperti dapur kantor, ruang arsip, atau ruang pelayanan administrasi. Penyebab Internal: 1. Adanya persepsi tradisional yang menganggap tugas pemeliharaan fasilitas sebagai domain laki-laki dapat menghambat partisipasi perempuan dalam proses tersebut; 2. Keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya pengarusutamaan gender dalam pengelolaan fasilitas kantor menyebabkan isu ini kurang mendapat perhatian dalam praktik sehari-hari Penyebab Eksternal: 1. Belanja pemeliharaan sering kali direncanakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender dari masyarakat pengguna. Akibatnya, fasilitas yang dipelihara mungkin tidak memenuhi kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan secara adil; 2. Mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemeliharaan fasilitas untuk memastikan perspektif mereka terwakili

Rencana tindak Lanjut	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tujuan	Memperbaiki dan memperbarui sarana serta prasarana, gedung kantor dapat mendukung kelancaran aktivitas kerja, sehingga meningkatkan efisiensi operasional organisasi serta Mengukur peningkatan jumlah fasilitas yang memenuhi standar responsif gender.	
		Aktivitas	Mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi fasilitas yang mendukung kebutuhan gender, seperti pembangunan ruang laktasi dan perbaikan aksesibilitas	
			Membangun atau memperbaiki fasilitas	
			Menyusun laporan pelaksanaan rehabilitasi yang memuat capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan, serta mempublikasikannya kepada seluruh pegawai untuk memastikan transparansi	
		Sumber Daya	Dana	51.450.000,00
			SDM	5 orang
			Sarana	1. Peralatan Kerja
			Prasarana	2. Ruang Kerja
Outcomes		Indikator Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
			Menyusun laporan kinerja yang mencakup analisis gender, sehingga transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya pengarusutamaan gender dalam pemeliharaan fasilitas dapat terjaga	

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PPP Kota Payakumbuh



Keterangan:

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1

2

3

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH:

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,
Telepon (0752) 93947 Faxsimile. 90810
Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER BUDGET STATEMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)	
Nama SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran	2027
Program	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Capaian Program	Presentase Pelayanan Air Minum
Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub-Kegiatan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Kode Rekening Sub-Kegiatan	1.03.03.2.01.03
Analisis Situasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses air minum yang aman dan layak. Dalam perspektif pengarusutamaan gender, akses terhadap air minum memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rumah tangga, di mana perempuan umumnya memiliki peran besar dalam pengelolaan air untuk keperluan Rumah Tangga. Keterbatasan akses air bersih dapat meningkatkan beban kerja perempuan sebagai ibu rumah tangga, menurunkan kualitas kesehatan keluarga, serta dapat berpotensi membatasi partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Berdasarkan Tahun Anggaran 2025, persentase akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan di Kota Payakumbuh telah mencapai 90,69% dari total jumlah penduduk sebanyak 150.869 jiwa. Hingga tahun 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas PUPR dan PDAM telah merealisasikan penyambungan instalasi air bersih ke rumah-rumah sebanyak 31.710 sambungan rumah. Aspek Akses, Ketimpangan Peran dan Tanggung Jawab Gender dalam Rumah Tangga, Bertanggung jawab atas pemenuhan air rumah tangga. Namun, mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan atau pengambilan keputusan terkait proyek SPAM, Perempuan sering tidak dilibatkan dalam forum musyawarah, sehingga kebutuhan spesifik mereka seperti lokasi titik sambungan rumah, fasilitas sanitasi, atau pengaturan jam distribusi tidak Aspek Kontrol/ Kewenangan: Minimnya Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan sering kali tidak memiliki posisi strategis dalam lembaga pengelola air minum (PDAM, Kelompok Pengelola SPAM). Akibatnya, suara mereka tidak terwakili dalam keputusan teknis, tarif, cakupan layanan, dan prioritas pembangunan Aspek Partisipasi, Perempuan Tidak Terlibat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan sehingga kebijakan terkait distribusi dan perluasan jaringan air. Mereka cenderung tidak diajak berdiskusi dalam forum formal, meskipun mereka adalah pengguna utama air. Aspek Manfaat, Ketika sistem penyediaan air tidak memperhitungkan kedekatan sumber air dengan rumah atau tidak menjangkau daerah terpencil, manfaatnya cenderung lebih dirasakan oleh laki-laki, sementara perempuan tetap harus menghabiskan waktu yang banyak untuk mengambil air serta Akses Terbatas kepada Air Bersih di Permukiman Perempuan Penyebab Internal: 1. Banyak lembaga pengelola SPAM, seperti PDAM atau BUMDes Air, masih didominasi oleh laki-laki di posisi penting. Kurangnya representasi perempuan di level pengelolaan atau pengambilan keputusan menyebabkan perspektif gender sering diabaikan dalam perencanaan dan implementasi proyek SPAM; 2. Program sosialisasi atau pelatihan terkait SPAM sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan waktu dan tempat bagi perempuan, atau bahkan tidak menasar kelompok perempuan secara khusus. Informasi yang tidak mudah diakses atau sulit dipahami oleh perempuan mengakibatkan keterbatasan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan air Penyebab Eksternal: 1. Kesenjangan Akses antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan dan di banyak wilayah perkotaan yang berkembang pesat, perumahan informal atau kumuh sering kali tidak terhubung dengan jaringan SPAM; 2. Program SPAM sering kali tidak menyebarkan informasi yang ramah gender atau terjangkau bagi semua anggota masyarakat, terutama perempuan, yang mungkin memiliki akses terbatas ke media atau forum pengambilan keputusan, kurang memahami hak mereka dalam akses air bersih.

		Penyebab Eksternal: 1. Kesenjangan Akses antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan dan dib anyak wilayah perkotaan yang berkembang pesat, perumahan informal atau kumuh sering kali tidak terhubung dengan jaringan SPAM; 2. Program SPAM sering kali tidak menyebarkan informasi yang ramah gender atau terjangkau bagi semua anggota masyarakat, terutama perempuan, yang mungkin memiliki akses terbatas ke media atau forum pengambilan keputusan, kurang memahami hak mereka dalam akses air bersih.		
Rencana tindak Lanjut	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Tujuan	Penyediaan Akses Air Bersih yang Merata bertujuan agar perempuan memiliki posisi yang setara dalam struktur pengelolaan air bersih, baik di tingkat kebijakan, operasional, maupun pengawasan.	
		Aktivitas	Penguatan Infrastruktur dan Akses Air Bersih di Daerah Terpencil	
			Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan dan Pengelolaan SPAM	
			Peningkatan Akses Informasi dan Sosialisasi SPAM dan Penyediaan Fasilitas Sanitasi yang Ramah Perempuan	
		Sumber Daya	Dana	5.600.000.000,00
			SDM	5 orang
			Sarana Prasarana	1. Peralatan Kerja 2. Ruang Kerja
		Indikator Ouput	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Outcomes	Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih	

Payakumbuh, 31 Maret 2026

Kepala Dinas PUPK Kota Payakumbuh



Keterangan:

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1

2

3

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH:

No	NAMA		JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,
Telepon (0752) 93947 Faksimile. 90810

Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

Nama SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran	2027
Program	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Capaian Program	Persentase Irigasi dengan Kondisi Baik
Kegiatan	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaam Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Dearh Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 ha dalam Saru Daerah Kabupaten/Kota
Sub-Kegiatan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Kode Rekening Sub-Kegiatan	1.03.02.2.02.08
Analisis Situasi	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Dalam perspektif pengarusutamaan gender, pengelolaan irigasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis infrastruktur, tetapi juga menyangkut akses, partisipasi, dan manfaat yang dirasakan oleh seluruh pelaku pertanian, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan, yang juga berperan dalam kegiatan pertanian dan pengelolaan hasil, seringkali memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, informasi, serta keterlibatan dalam kelembagaan pengelola irigasi seperti P3A/GP3A. Peningkatan jaringan irigasi yang diikuti dengan penguatan kelembagaan diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam pengelolaan irigasi, meningkatkan akses terhadap sumber daya air, serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan kondisi Tahun 2025, panjang jaringan irigasi yang telah ditingkatkan di Kota Payakumbuh mencapai 59 km. Persentase jaringan irigasi dengan kinerja baik tercatat sebesar 75,29%, sedangkan persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik mencapai 84,26%. Selain itu, persentase kelompok P3A/GP3A yang aktif sebesar Aspek Akses, Perempuan memiliki akses terbatas terhadap informasi teknis irigasi serta minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga irigasi (P3A/GP3A) Lahan yang dikelola berada di lokasi yang kurang terjangkau air Aspek Kontrol/ Kewenangan: Laki-laki umumnya memiliki atau menguasai lahan pertanian, sehingga memiliki hak lebih besar dalam menentukan kebutuhan irigasi. Perempuan yang hanya sebagai "pengelola" sering tidak punya kuasa atas keputusan teknis atau lokasi jaringan. Aspek Partisipasi, Adanya anggapan bahwa infrastruktur dan teknis irigasi adalah "urusan laki-laki" menyebabkan perempuan enggan atau tidak diberi ruang untuk ikut serta dalam proyek peningkatan irigasi. Aspek Manfaat, Irigasi yang baik meningkatkan hasil pertanian, dan ini berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga. Karena perempuan juga berkontribusi dalam proses pertanian, mereka turut merasakan manfaat ekonomi ini.

Rencana tindak Lanjut	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Tujuan	Penyediaan Akses Air Bersih yang Merata bertujuan agar perempuan memiliki posisi yang setara dalam struktur pengelolaan air bersih, baik di tingkat kebijakan, operasional, maupun pengawasan.	
		Aktivitas	Penguatan Infrastruktur dan Akses Air Bersih di Daerah Terpencil	
			Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan dan Pengelolaan SPAM	
			Peningkatan Akses Informasi dan Sosialisasi SPAM dan Penyediaan Fasilitas Sanitasi yang Ramah Perempuan	
		Sumber Daya	Dana	5.600.000.000,00
			SDM	5 orang
			Sarana	1. Peralatan Kerja
			Prasarana	2. Ruang Kerja
Outcomes		Indikator Output	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih	

Payakumbuh, 31 Maret 2026
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh



MUSLIM, ST. M.SI
NIP. 19750402 200003 1 005

Keterangan:

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1

2

3

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH:

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			